

Nomor : S-1/SETBPP/MKW/2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Progres Operasional Badan Pengarah Papua Triwulan IV Tahun 2025

6 Januari 2026

Yth. Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengarah Papua, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 pasal 16 dan Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 pasal 21, Sekretariat Badan Pengarah Papua menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya:
 - a. pengumpulan dan pelaporan data dan informasi laporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua.
 - b. koordinasi dan fasilitasi kegiatan Badan Pengarah Papua di Provinsi Papua.
 - c. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Badan Pengarah Papua.
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana angka 1, telah disusun Laporan Progres Operasional Badan Pengarah Papua Triwulan IV Tahun 2025 oleh Sekretariat BPP di Manokwari yang memuat dukungan baik secara administratif maupun substantif. Selanjutnya, laporan tersebut dikonsolidasikan oleh Sekretariat BPP Jayapura selaku Sekretariat BPP Koordinator.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan Laporan Progres Operasional Badan Provinsi Papua Triwulan IV Tahun 2025.

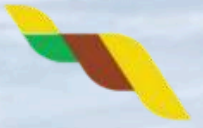
Demikian yang dapat disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Manokwari, 6 Januari 2026
Kepala Sekretariat Badan Pengarah
Papua Manokwari



Ditandatangani secara elektronik
Moch. Abdul Kobir





Laporan

Progres Operasional
Badan Pengarah Papua

Periode
TRIWULAN IV
2025

Sekretariat BPP Manokwari

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Progres Operasional Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua Barat Triwulan IV Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai salah satu wujud transparansi kinerja Sekretariat BPP di Manokwari.

Sekretariat BPP di Manokwari dibentuk berdasarkan Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua tanggal 6 September 2023. Sekretariat BPP di Manokwari melaksanakan tugas dalam memberikan fasilitasi dan dukungan baik dalam sisi substantif serta administratif pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua di Manokwari.

Laporan Progres Operasional BPP Papua Barat periode triwulan IV 2025 ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai fasilitasi dalam dukungan substantif dan administratif Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di wilayah Provinsi Papua Barat.

Segala keterbatasan dalam proses SHEK serta penyusunan laporan ini menjadi bagian yang tidak terhindarkan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran, masukan, serta kritik yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Sebagai penutup, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan serta dapat menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca.

MANOKWARI, 6 JANUARI 2026

KEPALA SEKRETARIAT BPP DI MANOKWARI



DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK
MOCH. ABDUL KOBIR



DAFTAR ISI

BAB I GAMBARAN UMUM.....	1
A. DASAR HUKUM	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	1
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA PENDUKUNG	2
E. DUKUNGAN KEUANGAN.....	3
F. SARANA DAN PRASARANA	3
1. DUKUNGAN RUANG KERJA.....	3
2. DUKUNGAN HUNIAN	6
3. DUKUNGAN KENDARAAN FUNGSIONAL	6
4. DUKUNGAN SARANA PRASARANA PENUNJANG LAINNYA (LAPTOP DAN JARINGAN INTERNET).....	6
BAB II DUKUNGAN ADMINISTRATIF	7
A. PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN.....	7
B. PELAKSANAAN PUBLIKASI PROGRAM KINERJA BPP PROVINSI PAPUA BARAT.....	10
C. PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN	11
D. LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN IV 2025	14
E. DUKUNGAN ADMINISTRATIF KEGIATAN BPP	15
BAB III DUKUNGAN SUBSTANTIF	20
A. RENCANA DAN PROGRAM KERJA BPP.....	20
B. KOMUNIKASI PUBLIK DAN PUBLIKASI BPP	21
C. PELAKSANAAN RAPAT KONSOLIDASI BPP BERSAMA ANGGOTA BPP DAN SEKRETARIAT BPP	24
D. FASILITASI PELAKSANAAN KOORDINASI, KERJASAMA KELEMBAGAAN DAN PENGUMPULAN DATA PELAKSANAAN OTSUS	27
BAB IV PENDING MATTERS.....	35
BAB V PENUTUP.....	37



BAB I GAMBARAN UMUM

A. DASAR HUKUM

Sebagaimana pengaturan dalam Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, dalam rangka Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Wilayah Papua dibentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Sekretariat Badan Pengarah Papua sebagai bagian dari Badan Pengarah Papua dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan aturan turunannya melalui Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua. Pada kedua aturan tersebut dinyatakan bahwa untuk membantu dan mendukung Badan Pengarah Papua dibentuk Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua, dilaksanakan oleh instansi vertikal yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan fungsi perbendaharaan pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

B. TUGAS DAN FUNGSI

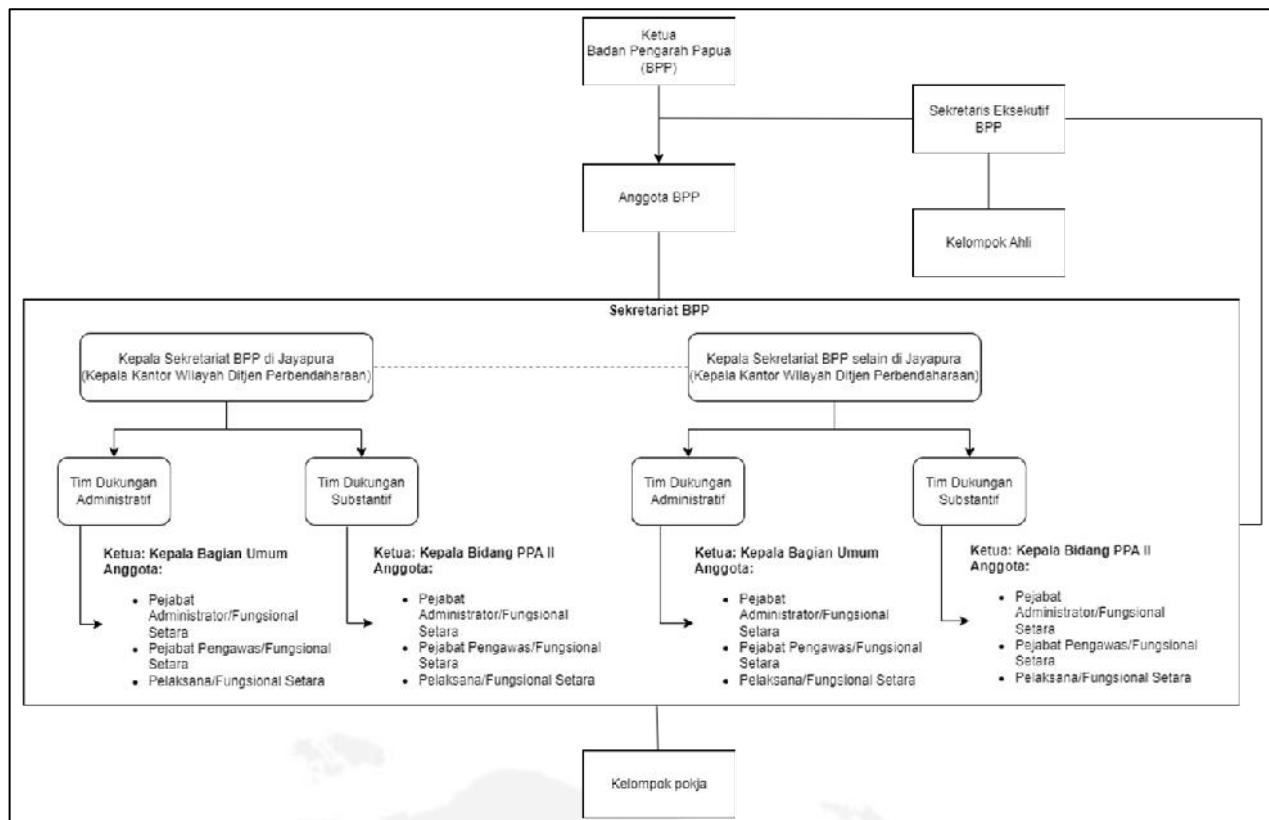
Sekretariat Badan Pengarah Papua memiliki tugas memberikan fasilitasi dan dukungan substantif dan administratif pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua. Dalam menjalankan tugas tersebut Sekretariat Badan Pengarah Papua menjalankan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Pengarah Papua;
2. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pemerintah daerah di wilayah Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
3. Fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
4. Pengumpulan dan pelaporan data dan informasi laporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
5. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Badan pengarah Papua di Provinsi Papua;
6. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas kelompok kerja di Provinsi Papua;
7. Peningkatan komunikasi publik antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan Masyarakat di Provinsi Papua;
8. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi;

9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan barang/jasa; dan/atau
10. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Badan Pengarah Papua.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berikut merupakan Struktur Organisasi Sekretariat Badan Pengarah Papua



D. SUMBER DAYA MANUSIA PENDUKUNG

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua Barat, telah ditetapkan Tim Dukungan Administratif dan Tim Dukungan Substantif sebagaimana Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-10/SETBPP/JYP/2025 tentang Perubahan Keempat Penetapan Tim Dukungan Administratif Dan Tim Dukungan Substantif Sekretariat Badan Pengarah Papua. Adapun berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari Kepala Sekretariat BPP Jayapura, per 1 Februari 2024 telah ditetapkan tenaga pendukung BPP Papua Barat yang masih aktif s.d. 31 Desember 2025 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan PPNPN
1	Christy Adestya Angkotta	PPNPN Pramubakti
2	Risma Amilza	PPNPN Pramubakti
3	Sergius Kumbubui	PPNPN Satpam
4	Djoko Kriswanto Daniel R.	PPNPN Pengemudi

E. DUKUNGAN KEUANGAN

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Badan Pengarah Papua, penyediaan anggaran bersumber dan terpusat pada DIPA Sekretariat BPP Provinsi Papua. S.d. Triwulan IV 2025, realisasi untuk pagu anggaran untuk BPP Papua Barat adalah sebagai berikut:

No	Kelompok Kerja	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Pokja Papua Barat Cerdas	292,994,000	275,514,104	94.03%
2	Pokja Papua Barat Sehat	274,670,000	233,127,239	84.88%
3	Pokja Papua Barat Produktif	274,670,000	263,472,110	95.92%
4	Pokja Papua Barat Polhukam	280,362,000	229,911,874	82.01%
5	Sekretariat BPP- Papua Barat	255,629,000	251,718,297	98.47%
Jumlah		1,378,325,000	1,253,743,624	90.96%

F. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat yang berkedudukan di Lantai III GKN Manokwari, Jalan Brigjen Abraham O. Atururi, Arfai Anday, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana merupakan dua komponen penting yang saling melengkapi dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dan fungsi penugasan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua. Dukungan sarana dan prasarana BPP Papua Barat antara lain:

1. DUKUNGAN RUANG KERJA

a. Ruang Pimpinan

Dalam mendukung tugas dan fungsi Anggota BPP Papua Barat, tersedia fasilitas ruang sekretariat pimpinan. Ruang sekretariat ini dilengkapi dengan meja kerja beserta 3 tempat duduk beserta peralatan ATK yang mendukung tugas dan fungsi sekretaris. Di

samping ruang sekretaris, terdapat *holding room* yang bisa menjadi ruang tamu



untuk para tamu pimpinan. *Holding room* ini dilengkapi dengan sofa dan meja jamuan tamu. Ruang rapat pimpinan dilengkapi dengan 4 kursi dan satu buah meja rapat beserta televisi untuk menampilkan bahan rapat. Selanjutnya, Ruang Kerja Pimpinan dengan fasilitas meja kerja, kursi pimpinan dan dua kursi untuk tamu. Juga terdapat *sice* dan televisi. Jika menelusuri lebih dalam lagi, terdapat ruang istirahat pimpinan didalamnya. Untuk rincian aset yang terdapat di Ruang Pimpinan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

No	Uraian Aset	Jumlah	Posisi Barang
1	Sofa	1	R. Sekre BPP
2	Kursi	5	R. Sekre BPP
3	Mesin Fotocopy	1	R. Sekre BPP
4	Printer	1	R. Sekre BPP
5	Alat Penghancur Kertas	1	R. Sekre BPP
6	Rak Besi	1	R. Sekre BPP
7	Meja Kerja Kayu	2	R. Sekre BPP
8	Lemari ES	1	R. Sekre BPP
9	Dispenser	1	R. Sekre BPP
10	AC	1	R. Sekre BPP
11	Sofa Coklat	1	R. Tamu Anggota BPP
12	Karpet	1	R. Tamu Anggota BPP
13	Air Cleaner	1	R. Tamu Anggota BPP
14	Meja Tamu Granit	1	R. Tamu Anggota BPP
15	Sofa	1	R. Anggota BPP
16	Air Cleaner	1	R. Anggota BPP
17	TV	1	R. Anggota BPP
18	Kursi	3	R. Anggota BPP
19	Meja Kerja	1	R. Anggota BPP
20	Lemari Besi	1	R. Rapat Anggota BPP
21	Kursi	4	R. Rapat Anggota BPP
22	Meja Rapat	1	R. Rapat Anggota BPP
23	TV	1	R. Rapat Anggota BPP
24	AC	1	R. Rapat Anggota BPP

b. Ruang Kerja Pokja

Di sisi lain lantai III terdapat ruang kerja pokja BPP yang terdiri dari beberapa ruangan yaitu *holding room* utama, ruang rapat utama, empat ruang kerja bagi pokja, ruang sekretariat, dan *pantry*. *Holding room* ini dilengkapi dengan 2 *sice* beserta pernak pernik hiasan di dinding, hal ini dikhususkan untuk tamu yang mau berkunjung

menemui anggota pokja. Ruang rapat utama pada ruang kerja pokja BPP digunakan untuk rapat dengan kapasitas 7 orang. Ruang rapat ini dilengkapi pula meja rapat dan televisi untuk memaparkan bahan rapat. Pada masing-masing ruang pokja dilengkapi 4 kursi anggota dan 1 kursi ketua pokja beserta mejanya. Juga terdapat printer pada salah satu ruang pokja untuk menunjang administrasi yang dilakukan. Untuk ruang sekretariat dilengkapi dengan 4 meja, 1 lemari besi dan 3 kursi. Terakhir terdapat *pantry* yang dilengkapi dengan kulkas, dispenser, kompor elektrik, dan *kitchen set*. Untuk rincian aset yang ada di Ruang Kerja Pokja dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Uraian Aset	Jumlah	Posisi Barang
1	Lemari Es	1	<i>Pantry</i> BPP
2	Dispenser	1	<i>Pantry</i> BPP
3	Kompor Listrik	1	<i>Pantry</i> BPP
4	Meja Kerja	2	<i>Pantry</i> BPP
5	<i>Kitchen Set</i>	1	<i>Pantry</i> BPP
6	Kursi Besi	1	<i>Pantry</i> BPP
7	Loker	3	R. Pokja
8	Kursi	5	R. Pokja BPP 01
9	Meja Kerja	5	R. Pokja BPP 01
10	Rak Kayu	1	R. Pokja BPP 01
11	Kursi Fiberglass	5	R. Pokja BPP 02
12	Meja Kerja Kayu	5	R. Pokja BPP 02
13	Rak Kayu	1	R. Pokja BPP 02
14	Kursi Fiber	12	R. Rapat Pokja BPP 03
15	Sound System	1	R. Rapat Pokja BPP 03
16	Microphone Table Stand	1	R. Rapat Pokja BPP 03
17	Televisi	1	R. Rapat Pokja BPP 03
18	Meja Rapat Lengkung	1	R. Rapat Pokja BPP 03
19	Sice	2	R. Tamu Pokja
20	Kursi	5	R. Pokja BPP 05
21	Meja Kerja	5	R. Pokja BPP 05
22	Rak Kayu	1	R. Pokja BPP 05
23	Kursi Besi/ Metal	5	R. Pokja BPP 06
24	Meja Kerja Kayu	5	R. Pokja BPP 06
25	Printer	1	R. Pokja BPP 06
26	PC	2	R. Pokja BPP 06
27	Kursi	1	R. Pokja BPP 06
28	Rak Kayu	1	R. Pokja BPP 06
29	Meja Kerja	4	R. Pokja BPP 07
30	Lemari Besi	1	R. Pokja BPP 07

2. DUKUNGAN HUNIAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pelaksanaan SHEK BPP Papua Barat, diperlukan penyediaan hunian yang layak dan nyaman bagi perangkat BPP. Bagian belakang Mess Perbendaharaan Manokwari yang terletak di Jl. Yos Sudarso dipilih sebagai lokasi hunian/Mess BPP Papua Barat.



Pembangunan awal untuk pondasi telah dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2024. Pada awal tahun anggaran 2025, telah dilaksanakan *Refocusing* Anggaran sehingga kelanjutan pekerjaan pelaksanaan kegiatan pengadaan Mess hunian Badan Pengarah Papua akan dilanjutkan pada tahun Anggaran 2026.

3. DUKUNGAN KENDARAAN FUNGSIONAL

Dalam rangka dukungan pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengarah Papua Barat, tersedia Kendaraan Dinas Fungsional.



4. DUKUNGAN SARANA PRASARANA PENUNJANG LAINNYA (LAPTOP DAN JARINGAN INTERNET)

Guna menunjang tugas dan fungsi, administrasi, dan kinerja pada BPP Papua Barat, disediakan perangkat laptop sebanyak 20 unit. Dari jumlah tersebut, telah dipinjamkan kepada Badan Pengarah Papua sebanyak 11 unit. Selain itu untuk akses internet pada Lantai III GKN Manokwari, telah tersedia akses internet *Starlink*.



BAB II DUKUNGAN ADMINISTRATIF

A. PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua Barat untuk pelaksanaan kegiatan operasional Badan Pengarah Papua di wilayah Papua Barat Tahun 2025, telah dilaksanakan *mapping*/pembagian pagu anggaran yang juga merupakan sebuah kesatuan dari anggaran BPP Provinsi Papua, sehingga untuk pengelolaannya dibentuk Tim Dukungan Administrasi Keuangan untuk membantu penyelesaian pertanggungjawaban keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional BPP Provinsi Papua Barat termasuk adanya pembagian pejabat pengelola keuangan yaitu PPK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pada Tahun 2025, di Provinsi Papua Barat, Anggaran BPP Papua Barat terbagi menjadi 4 Pokja dan 1 Sekretariat BPP Papua Barat dengan rincian anggaran sebagaimana berikut:

No	Kelompok Kerja	Pagu
1	Pokja Papua Barat Cerdas	292.994.000
2	Pokja Papua Barat Sehat	274.670.000
3	Pokja Papua Barat Produktif	274.670.000
4	Pokja Papua Barat Polhukam	280.362.000
5	Sekretariat BPP- Papua Barat	255.605.000
Jumlah		1.378.301.000

Pada awal tahun 2025, sebagaimana Notas Dinas Kepala Sekretariat BPP BPP Jayapura nomor ND-2/SETBPP/JYP/2025 tanggal 15 Januari 2025, telah disusun dan disampaikan Rencana dan Program Kerja Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua Barat TA 2025 sebagaimana detail berikut:

1. POKJA Papua Produktif

Nota dinas dari POKJA nomor Nomor-02 /BP3OKP/PB/I/2025 tentang Penyampaian Program Kerja Kelompok Kerja (POKJA) Papua Cerdas BPP Papua Barat Tahun 2025.

2. POKJA Papua Sehat

Nota dinas dari POKJA nomor Nomor-02 /BP3OKP/PB/I/2025 tentang Penyampaian Program Kerja Kelompok Kerja (POKJA) Papua Cerdas BPP Papua Barat Tahun 2025.

3. POKJA Papua Cerdas

Nota dinas dari POKJA nomor Nomor-02 /BP3OKP/PB/I/2025 tentang Penyampaian Program Kerja Kelompok Kerja (POKJA) Papua Cerdas BPP Papua Barat Tahun 2025.

4. POKJA Papua Polhukam

Nota dinas dari POKJA nomor Nomor-02 /BP3OKP/PB/I/2025 tentang Penyampaian Program Kerja Kelompok Kerja (POKJA) Papua Cerdas BPP Papua Barat Tahun 2025

Selain rencana kerja, pada Triwulan IV Tahun 2025, Anggota, POKJA, dan Sekretariat BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat telah mengajukan rencana kebutuhan anggaran untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Bulan Oktober 2025

- a. Anggota Pokja Papua Cerdas BPP Papua Barat mengikuti Kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Papua Tahun 2025 pada tanggal 20 s.d. 22 Oktober 2025 di Vega *Prime Hotel* dan *Convention* Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
- b. Anggota Pokja BPP Papua Barat melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi RIPPP dan RAPPP Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 19 Oktober s.d. 24 Oktober 2025 di Kabupaten Teluk Bintuni.
- c. Anggota dan Pokja BPP Papua Barat mengikuti Peringatan Satu Abad Nubuatan Injil dan Peradaban Pendidikan oleh Pendeta I.S. Kijne pada tanggal 24 s.d 26 Oktober 2025 di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.
- d. Anggota Pokja BPP Papua Cerdas mengikuti kegiatan Rapat Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan pada tanggal 30 Oktober 2025 di Kantor Gubernur Papua Barat.

2. Bulan November 2025

- a. Tim Sekretariat BPP Papua Barat mengikuti kegiatan Pelaksanaan Pembahasan Rekrutmen Pokja BP3OKP dan Peraturan Terkait Hak dan Kewajiban BP3OKP pada tanggal 17 November s.d. 19 November 2025 di Jayapura.
- b. Tim Sekretariat BPP Papua Barat melaksanakan kegiatan Penyusunan Juknis Penilaian kinerja kelompok kerja BPP pada tanggal 19 November s.d. 21 November 2025 di Jayapura, Papua.
- c. Anggota Pokja BPP Papua Barat melaksanakan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) di Kabupaten Kaimana dan *Aessment* serta Koordinasi Akselerasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Program (RAP) Tahun 2026 pada tanggal 25 November s.d. 29 November 2025 di Kabupaten Kaimana.
- d. Anggota Pokja BPP Papua Barat melaksanakan *Aessment* dan Koordinasi Akselerasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Program (RAP) Tahun 2026 pada tanggal 23 November s.d. 28 November 2025 di Kabupaten Teluk Bintuni.
- e. Anggota Pokja BPP Papua Barat melaksanakan *Aessment* dan Koordinasi Akselerasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Program (RAP) Tahun 2026 serta Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK) Percepatan

Pembangunan, Pengembangan Pariwisata dan Peninjauan UMKM pada tanggal 24 November s.d. 28 November 2025 di Kabupaten Pegunungan Arfak.

- f. Anggota Pokja BPP Papua Barat melaksanakan *Aessment* dan Koordinasi Akselerasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Program (RAP) Tahun 2026 dan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi (SHEK) terkait program kerja Papua Sehat Tahun 2025 pada tanggal 24 November s.d. 29 November 2025 di Kabupaten Pegunungan Arfak.

3. Bulan Desember 2025

- a. Anggota Pokja BPP Papua Barat melaksanakan kegiatan *Aessment* dan Koordinasi Akselerasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Program (RAP) Tahun 2026 pada Kabupaten Teluk Wondama pada tanggal 30 November s.d. 5 Desember 2025 dan Kabupaten Manokwari Selatan pada tanggal 9 Desember s.d. 11 Desember 2025.
- b. Anggota Pokja BPP Papua Barat melaksanakan *Aessment* dan Koordinasi Akselerasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Program (RAP) Tahun 2026 serta Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK) Percepatan Pembangunan, Pengembangan Pariwisata dan Peninjauan UMKM pada tanggal 1 Desember s.d. 5 Desember 2025 di Kabupaten Manokwari Selatan.
- c. Anggota Pokja BPP Papua Barat melaksanakan *Aessment* dan Koordinasi Akselerasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Program (RAP) Tahun 2026 dan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi (SHEK) terkait program kerja Papua Sehat Tahun 2025 pada Tanggal 1 Desember s.d. 5 Desember 2025 di Kabupaten Manokwari Selatan dan pada tanggal 8 Desember s.d. 13 Desember 2025 di Kabupaten Teluk Bintuni.
- d. Anggota Pokja BPP Papua Barat mengikuti Penyelenggaraan Kegiatan Bazar UMKM Naik Kelas, Gerakan Pangan Murah, Kontes Dangdut Akbar Ke-II Tahun 2025, pelaksanaan pendampingan kegiatan identifikasi dan pendataan kebutuhan dasar (primer) dan kebutuhan lainnya utamanya Perumahan Layak Huni (RLH) kepada masyarakat Orang Asli Papua (OAP), serta Pendampingan masyarakat terkait budidaya Tanaman Pala Bundar (*Myristica fragrans*) dan Kelapa Hibrida (*Cocos nucifera*) sebagai *Pilot Project* pelaksanaan pembentukan perkebunan percontohan di Tanah Papua pada tanggal 6 Desember s.d. 9 Desember 2025 di Kabupaten Fak-Fak.
- e. Anggota Pokja BPP Papua Barat mengikuti Rapat Diseminasi Rancangan Akhir Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Papua Barat Periode 2025–2029 pada tanggal 15 Desember 2025 di Hotel VITTA Niu Manokwari

B. PELAKSANAAN PUBLIKASI PROGRAM KINERJA BPP PROVINSI PAPUA BARAT

1. Pemberitaan melalui Media Massa

- a. Wapres minta pembangunan Papua harus lebih cepat, di liput tautan pada

<https://papatengah.antaraneews.com/berita/74557/wapres-minta-pembangunan-papua-harus-lebih-cepat>



- b. BP3OKP Papua Barat gelar FGD dengan Pelaku UMKM, di liput pada tautan

<https://taburapos.co/2025/11/13/bp3okp-papua-barat-gelar-fgd-dengan-pelaku-umkm/>



- c. Pakai Noken, Gibran Pimpin Rapat BP3OKP Bareng Komite Percepatan Otsus Papua , di liput pada tautan

<https://nasional.kompas.com/read/2025/11/04/15222001/pakai-noken-gibran-pimpin-rapat-bp3okp-bareng-komite-percepatan-otsus-papua>.

2. Pemberitaan pada Website dan Media Sosial BPP

- a. Pendidikan Papua Barat Butuh Perubahan Regulasi, BP3OKP Angkat Suara , pada

tautan <https://badanpengarahpapua.go.id/2025/07/pendidikan-papua-barat-butuh-perubahan-regulasi-bp3okp-angkat-suara/>

- b. Audiensi Wakil Presiden RI Bersama Badan Pengarah Papua, pada tautan

<https://badanpengarahpapua.go.id/2025/09/audiensi-wakil-presiden-ri-bersama-badan-pengarah-papua/>

- c. BPP dan Komite Eksekutif Bahas Rencana Kerja 2026, Fokus pada Penguatan Otsus dan Percepatan Pembangunan Papua, pada tautan

<https://badanpengarahpapua.go.id/2025/12/bpp-dan-komite-eksekutif-bahas-rencana-kerja-2026-fokus-pada-penguatan-otsus-dan-percepatan-pembangunan-papua/>

- d. Wapres Tekankan Penggunaan Anggaran Papua Harus Fokus dan Berdampak Langsung bagi Masyarakat, pada tautan <https://www.wapresri.go.id/wapres-tekanan-penggunaan-anggaran-papua-harus-fokus-dan-berdampak-langsung-bagi-masyarakat/>
- e. Pimpin Rapat Pleno BP3OKP, Wapres Tekankan Akselerasi Pembangunan Papua Harus Dua Kali Lipat pada <https://www.wapresri.go.id/pimpin-rapat-pleno-bp3okp-wapres-tekanan-akselerasi-pembangunan-papua-harus-dua-kali-lipat/>
- f. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) “Pengembangan Ekonomi Orang Asli Papua melalui Program Papua Produktif” pada https://www.instagram.com/djpbpabar/p/DRBGvaskx_T/

C. PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN

Proses pembayaran kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi BPP Papua Barat telah dilakukan secara tepat waktu, hal tersebut berdasarkan proses bisnis yang telah disepakati dan terus menerus dilakukan evaluasi baik oleh internal tim pengelolaan keuangan BPP Manokwari dan BPP Kanwil Jayapura (selaku koordinator). Pada triwulan IV Tahun 2025, telah dilakukan sebanyak satu kali penggantian UP KKP sebesar Rp6.000.000,00 untuk pembelian ATK, penggantian uang persediaan/revolving sebanyak 2 (dua kali) yaitu masing-masing sebesar Rp92.491.711,00 dan 19.864.200,00. Selain itu juga dilakukan 2 (dua) kali pertanggungjawaban tambahan uang persediaan (PTUP) yaitu masing-masing sebesar Rp230.421.242,00 dan Rp9.547.910,00 yang keseluruhannya berasal dari belanja barang yang meliputi belanja dari akun belanja bahan, belanja pemeliharaan, belanja keperluan sehari-hari perkantoran, dan belanja perjalanan dinas.

Pada triwulan ke IV 2025 ini, BPP Papua Barat tidak mengajukan pembayaran dengan metode LS Rampung/LS Uang Muka. Namun, perekaman SPBy- penerbitan kuitansi-Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP)-pembuatan konsep SPP s.d. SPM dilakukan pada hari yang sama setelah dilakukan validasi kebenaran atas hak tagih oleh PPK.

Berikut merupakan rincian pembayaran perjadiin BPP Papua Barat:

No	Uraian Kegiatan BPP Papua Barat	Tanggal Daftar Rincian Perjadiin	Tanggal Pembayaran	Rentang Waktu
1	Kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Papua Tahun 2025 pada tanggal 20 s.d. 22 Oktober 2025 di Vega <i>Prime Hotel</i> dan <i>Convention</i> Kota Sorong	22 Oktober 2025	25 Oktober 2025	3 hari

2	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi RIPP dan RAPPP Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 19 Oktober s.d. 24 Oktober 2025 di Kabupaten Teluk Bintuni	24 Oktober 2025	27 Oktober 2025	3 hari
3	Peringatan Satu Abad Nubuatan Injil dan Peradaban Pendidikan oleh Pendeta I.S. Kijne pada tanggal 24 s.d 26 Oktober 2025 di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat	26 Oktober 2025	27 Oktober 2025	1 hari
4	Kegiatan Pelaksanaan Pembahasan Rekrutmen Pokja BP3OKP dan Peraturan Terkait Hak dan Kewajiban BP3OKP pada tanggal 17 November s.d. 19 November 2025 di Jayapura.	24 November 2025	27 November 2025	3 hari
5	Kegiatan Penyusunan Juknis Penilaian kinerja kelompok kerja BPP pada tanggal 19 November s.d. 21 November 2025 di Jayapura, Papua.	24 November 2025	28 November 2025	4 hari
6	Kegiatan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) di Kabupaten Kaimana dan Assessment serta Koordinasi Akselerasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Program (RAP) Tahun 2026 pada tanggal 25 November s.d. 29 November 2025 di Kabupaten Kaimana.	1 Desember 2025	5 Desember 2025	4 hari
7	Kegiatan <i>Assessment</i> dan Koordinasi Akselerasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Program (RAP) Tahun 2026 pada tanggal 23 November s.d. 28 November 2025 di Kabupaten Teluk Bintuni	1 Desember 2025	5 Desember 2025	4 hari
8	<i>Assessment</i> dan Koordinasi Akselerasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Program (RAP) Tahun 2026 serta Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK) Percepatan Pembangunan, Pengembangan Pariwisata dan	1 Desember 2025	5 Desember 2025	4 hari

	Peninjauan UMKM pada tanggal 24 November s.d. 28 November 2025 di Kabupaten Pegunungan Arfak			
9	<i>Assessment</i> dan Koordinasi Akselerasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Program (RAP) Tahun 2026 dan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi (SHEK) terkait program kerja Papua Sehat Tahun 2025 pada tanggal 24 November s.d. 29 November 2025 di Kabupaten Pegunungan Arfak.	1 Desember 2025	5 Desember 2025	4 hari
11	<i>Assessment</i> dan Koordinasi Akselerasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Program (RAP) Tahun 2026 pada Kabupaten Teluk Wondama pada tanggal 30 November s.d. 5 Desember 2025	8 Desember 2025	12 Desember 2025	4 hari
12	<i>Assessment</i> dan Koordinasi Akselerasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Program (RAP) Tahun 2026 serta Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK) Percepatan Pembangunan, Pengembangan Pariwisata dan Peninjauan UMKM pada tanggal 1 Desember s.d. 5 Desember 2025 di Kabupaten Manokwari Selatan	8 Desember 2025	12 Desember 2025	4 hari
13	<i>Assessment</i> dan Koordinasi Akselerasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Program (RAP) Tahun 2026 dan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi (SHEK) terkait program kerja Papua Sehat Tahun 2025 pada Tanggal 1 Desember s.d. 5 Desember 2025 di Kabupaten Manokwari Selatan dan pada tanggal 8 Desember s.d. 13 Desember 2025 di Kabupaten Teluk Bintuni	8 Desember 2025	12 Desember 2025	4 hari

14	Penyelenggaraan Kegiatan Bazar UMKM Naik Kelas, Gerakan Pangan Murah, Kontes Dangdut Akbar Ke-II Tahun 2025, pelaksanaan pendampingan kegiatan identifikasi dan pendataan kebutuhan dasar (primer) dan kebutuhan lainnya utamanya Perumahan Layak Huni (RLH) kepada masyarakat Orang Asli Papua (OAP), serta Pendampingan masyarakat terkait budidaya Tanaman Pala Bundar (<i>Myristica fragrans</i>) dan Kelapa Hibrida (<i>Cocos nucifera</i>) sebagai <i>Pilot Project</i> pelaksanaan pembentukan perkebunan percontohan di Tanah Papua pada tanggal 6 Desember s.d. 9 Desember 2025 di Kabupaten Fak-Fak	15 Desember 2025	19 Desember 2025	4 hari
----	---	------------------	------------------	--------

Berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan oleh PPK kepada seluruh pegawai BPP, maksimal pencairan uang SPPD Perjalanan dinas adalah 5 hari kerja setelah dokumen diterima dengan lengkap dan benar.

D. LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN IV 2025

Pada tahun anggaran 2025, BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat, yang terdiri dari empat kelompok kerja (pokja) dan sekretariat BPP Papua Barat memiliki pagu yang sebagian besar diperuntukkan untuk belanja bahan, perjalanan dinas (biasa dan dalam kota), dan jasa profesi. Adapun untuk sekretariat mendapatkan anggaran sesuai dengan kebutuhan dukungan manajemen dengan total alokasi pada masing-masing pokja dan sekretariat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut bersamaan dengan progress kinerja keuangan s.d. Triwulan IV 2025 sebagaimana berikut:

No	Kelompok Kerja	Pagu	Realisasi TW IV 2025	Realisasi s.d. TW IV 2025	Persentase
1	Pokja Papua Barat Cerdas	292,994,000	65,260,350	277,954,104	94.87%
2	Pokja Papua Barat Sehat	274,670,000	74,043,750	233,537,239	85.02%
3	Pokja Papua Barat Produktif	274,670,000	106,351,050	263,882,110	96.07%
4	Pokja Papua Barat Polhukam	280,362,000	65,806,945	229,911,874	82.01%
5	Sekretariat BPP- Papua Barat	255,605,000	55,468,469	251,718,297	98.48%
Jumlah		1,378,301,000	366,930,564	1,257,003,624	91.20%

Pada periode triwulan IV 2025, dilaksanakan akselerasi program kegiatan baik pada Pokja maupun sekretariat dalam fungsi dukungan teknis, administratif, maupun substantif dalam pelaksanaan SHEK BPP Papua Barat.

Para periode realisasi anggaran Triwulan IV Tahun 2025, secara keseluruhan menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Dari total pagu anggaran sebesar Rp1.378.301.000, realisasi anggaran mencapai Rp1.257.003.624 atau 91,20 persen, yang mencerminkan tingkat penyerapan anggaran yang optimal. Secara rinci, realisasi anggaran masing-masing kelompok kerja dan sekretariat menunjukkan capaian yang bervariasi namun tetap berada pada kategori tinggi. Sekretariat BPP Papua Barat mencatat persentase realisasi tertinggi sebesar 98,48 persen, diikuti oleh Pokja Papua Barat Produktif dengan realisasi 96,07 persen dan Pokja Papua Barat Cerdas sebesar 94,87 persen. Sementara itu, Pokja Papua Barat Sehat dan Pokja Papua Barat Polhukam masing-masing merealisasikan anggaran sebesar 85,02 persen dan 82,01 persen.

E. DUKUNGAN ADMINISTRATIF KEGIATAN BPP

Dalam hal pemberian sarana dan prasarana kerja yang baik dan memadai guna memperlancar administrasi perkantoran dan pelayanan BPP, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Papua Barat memfasilitasi bantuan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pokja dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berkaitan dengan proses bisnis dan tata administrasi yang telah disepakati, permohonan penyediaan fasilitas dapat disampaikan kepada sekretariat BPP Papua Barat c.q. PPK melalui proposal/naskah dinas/dokumen sejenis dengan melihat rencana kerja dan kebutuhan yang telah disampaikan dan disepakati sebelumnya.

Berikut adalah pelaksanaan dukungan administratif dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPP Papua Barat yang dilaksanakan berdasarkan proposal program kerja BPP pada triwulan IV 2025.

1. Penerbitan Surat Tugas nomor ST-60/SETBPP/MKW/2025 penugasan Anggota Pokja BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi RIPP dan RAPP Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 19 Oktober s.d. 24 Oktober 2025 berdasarkan Surat Anggota Perwakilan BP3OKP Papua Barat Nomor 151/BP3OKP-RI/PB/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025 hal Proposal Kegiatan Monitoring dan Evaluasi RIPP dan RAPP Kabupaten Teluk Bintuni dengan agenda kegiatan berikut:
 - a. Sinkronisasi Program Papua Cerdas dalam rangka meninjau sistem pendidikan di distrik Moskona berkaitan dengan mutu layanan pendidikan dari tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA di Kabupaten Teluk Bintuni.
 - b. Sinkronisasi Program Papua Produktif dalam rangka meninjau kawasan baru dalam rangka pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di kampung Idor Kabupaten Teluk Bintuni.
 - c. Pembinaan dan Pengawasan Dana Otonomi Khusus (DOK) Tahun 2024 dan syarat salur Dana Otsus 2025.
 - d. Sinkronisasi Program Papua Polhukam dalam rangka pengamatan resolusi konflik di Kabupaten Teluk Bintuni
2. Penerbitan Surat Tugas nomor ST-72/SETBPP/MKW/2025 penugasan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi Percepatan Peningkatan Layanan Pendidikan, Sekolah Advokasi, Pariwisata Rintisan, Pengembangan Pangan Lokal dan Kondisi Perlu dalam Rangka Otonomi

Khusus Kabupaten Kaimana pada tanggal 18 November s.d. 22 November 2025 berdasarkan Proposal Anggota Perwakilan BP3OKP Papua Barat Nomor 157/BP3OKP-RI/PB/XI/2025 tanggal 4 November 2025 hal Permohonan Penerbitan Surat Tugas, dengan ini disampaikan surat tugas nomor ST-72/SETBPP/MKW/2025 tanggal 7 November 2025. Adapun agenda kegiatan tersebut antara lain:

- a. Melakukan SHEK dan Kajian Dokumen Akademisi Program Sekolah Vokasi dan layanan Pendidikan di Kepulauan Lobo Kabupaten Kaimana.
 - b. Melakukan SHEK Program Pariwisata Rintisan dan Pengembangan Pangan Lokal di Teluk Triton dan Kepulauan Lobo Kabupaten Kaimana.
 - c. Melakukan FGD dengan OPD teknis berkaitan dengan Sekolah Vokasi dan Pariwisata Rintisan.
3. Penerbitan Surat Tugas nomor ST-81/SETBPP/MKW/2025 berdasarkan Proposal Anggota BP3OKP Papua Barat Nomor 157/BP3OKP-RI/PB/XI/2025 tanggal 20 November 2025 untuk penugasan Anggota Pokja BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan kegiatan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dan Asessment serta Koordinasi Akselerasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Program (RAP) Tahun 2026 pada tanggal 25 November s.d. 29 November 2025 di Kabupaten Kaimana dengan agenda kegiatan sebagai berikut:
- a. Asessment dan koordinasi akselerasi penyerapan anggaran tahun 2025 dan Rencana Anggaran Program (RAP) tahun 2026.
 - b. Melakukan SHEK dan Kajian Dokumen Akademisi Program Sekolah Vokasi dan layanan Pendidikan di Kepulauan Lobo Kabupaten Kaimana.
 - c. Melakukan SHEK Program Pariwisata Rintisan dan Pengembangan Pangan Lokal di Teluk Triton dan Kepulauan Lobo Kabupaten Kaimana.
 - d. Melakukan FGD dengan OPD teknis berkaitan dengan Sekolah Vokasi dan Pariwisata Rintisan.
 - e. Harmonisasi Keamanan dan Pembinaan ketertiban melalui peningkatan peran aktif tokoh adat, agama, perempuan dan masyarakat melalui dialog langsung untuk mendapatkan peningkatan stabilitas dan lingkungan yang kondusif.
4. Penerbitan Surat Tugas nomor ST-83/SETBPP/MKW/2025 berdasarkan Proposal Anggota Perwakilan BP3OKP Papua Barat Nomor 163/BP3OKP-RI/PB/XI/2025 tanggal 20 November 2025 hal Permohonan Penerbitan Surat Tugas kegiatan Asessment dan Koordinasi Akselerasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Program (RAP) Tahun 2026 menugasi Anggota Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan Asessment dan Koordinasi Akselerasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Program (RAP) Tahun 2026 serta Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK) Percepatan Pembangunan, Pengembangan Pariwisata dan Peninjauan UMKM pada tanggal 24 November s.d. 28 November 2025 di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat dengan agenda kegiatan sebagai berikut:
- a. Akselerasi penyerapan anggaran kesehatan 2025;
 - b. Penyusunan RAP 2026 yang berkualitas dan berbasis Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2025-2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025-2029;

- c. Melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR terkait lokasi persiapan penataan Kawasan Danau Anggi Giji Kabupaten Pegunungan Arfak serta melakukan peninjauan lapangan; dan
 - d. Audiensi dengan Dinas Pariwisata terkait Pengembangan Wisata Danau Anggi.
5. Penerbitan Surat Tugas nomor ST-84/SETBPP/MKW/2025 tanggal 20 November 2025 berdasarkan Proposal Anggota Perwakilan BP3OKP Papua Barat Nomor 164/BP3OKP-RI/PB/XI/2025 tanggal 20 November 2025 penugasan Anggota Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan *Assessment* dan Koordinasi Akselerasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Program (RAP) Tahun 2026 dan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi (SHEK) terkait program kerja Papua Sehat Tahun 2025 pada tanggal 24 November s.d. 29 November 2025 di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat dengan agenda kegiatan sebagai berikut:
- a. Akselerasi penyerapan anggaran kesehatan 2025;
 - b. Penyusunan RAP 2026 yang berkualitas dan berbasis Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2025-2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025-2029;
 - c. Evaluasi mendalam 4 indikator permasalahan strategis Kesehatan; dan
 - d. Implementasi Program Kartu Papua Barat Sehat.
6. Penerbitan Surat Tugas nomor ST-97/SETBPP/MKW/2025 tanggal 5 Desember 2025 berdasarkan Surat Anggota Perwakilan BP3OKP Papua Barat Nomor 179/BP3OKP-RI/PB/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025 penugasan Pokja BPP Papua Barat pada tanggal 6 Desember s.d. 9 Desember 2025 di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat dengan agenda kegiatan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan pendampingan kegiatan identifikasi dan pendataan kebutuhan dasar (primer) dan kebutuhan lainnya utamanya Perumahan Layak Huni (RLH) kepada masyarakat Orang Asli Papua (OAP).
 - b. Pendampingan masyarakat terkait budidaya Tanaman Pala Bundar (*Myristica fragrans*) dan Kelapa Hibrida (*Cocos nucifera*) sebagai Pilot Project pelaksanaan pembentukan perkebunan percontohan di Tanah Papua.
 - c. Menghadiri Penyelenggaraan Kegiatan Bazar UMKM Naik Kelas, Gerakan Pangan Murah, Kontes Dangdut Akbar Ke-II Tahun 2025.
7. Penerbitan Surat Tugas nomor ST-98/SETBPP/MKW/2025 tanggal 6 Desember 2025 berdasarkan Surat Anggota BP3OKP Papua Barat tanggal 6 Desember 2025 Nomor 182/BP3OKP-RI/PB/XII/2025 pelaksanaan penugasan Anggota Pokja BP3OKP Papua Barat kegiatan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) Percepatan Pembangunan dan Peninjauan UMKM Di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat pada tanggal 8 Desember s.d. 12 Desember 2025 di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat dengan agenda kegiatan sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait Perluasan Bandara Stenkool serta peninjauan lapangan.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait Pelabuhan Muturi serta peninjauan lapangan.
 - c. Melakukan Peninjauan ke UMKM Kepiting di Distrik Babo serta memastikan keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam usaha kepiting.

Berikut adalah pelaksanaan dukungan administratif dan fasilitas pelaksanaan kegiatan rapat kerja bulanan serta kegiatan yang diinisiasi oleh Sekretariat BPP Manokwari yang telah dilaksanakan pada triwulan IV 2025.

1. Rapat Kerja Bulanan BPP Papua Barat dan BPP Papua Barat Daya periode bulan Oktober 2025.

Penyelenggaraan Rapat Kerja Bulan Oktober didasarkan atas undangan nomor UND-17/SETBPP/MKW/2025 terkait monitoring pelaksanaan SHEK Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dan dilaksanakan secara hybrid, luring di Aula Kasuari Lt.3 Gedung Keuangan Manokwari dan daring melalui media *zoom teleconference* pada 9 Oktober 2025 2025. Rapat ini dihadiri oleh Ibu Irene Manibuy, Bapak Drs. Otto Ihalauw, M.A, para Anggota Pokja Badan Pengarah Papua Papua Barat dan Papua Barat Daya, para Anggota Tim Administratif Sekretariat BPP Manokwari dan para Anggota Tim Substantif Sekretariat BPP Manokwari. Kegiatan ini selain membahas progres kerja bulanan juga membahas terkait pengaturan pelaksanaan tugas kesekretariatan BPP Papua Barat berdasarkan S-55/SETBPP/JYP/2025 dimana kewenangan penanganan urusan administratif maupun substantif BPP BPP Papua Barat Daya dapat dilaksanakan oleh Sekretariat BPP Papua Barat.



2. Rapat Kerja Bulanan BPP Papua Barat dan BPP Papua Barat Daya periode bulan November 2025.

Penyelenggaraan Rapat Kerja Bulan November didasarkan atas undangan nomor UND-18/SETBPP/MKW/2025 pelaksanaan monitoring pelaksanaan SHEK Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dan dilaksanakan secara hybrid, luring di Aula Kasuari Lt.3 Gedung Keuangan Manokwari dan daring melalui media *zoom teleconference* pada 3 November s.d. 6 November 2026. Rapat ini dihadiri oleh Ibu Irene Manibuy, Bapak Drs. Otto Ihalauw, M.A, para Anggota Pokja Badan Pengarah Papua Papua Barat dan Papua Barat Daya, para Anggota Tim Administratif Sekretariat BPP Manokwari dan para Anggota Tim Substantif Sekretariat BPP Manokwari.



3. Pelaksanaan Rapat Finalisasi Bahan Paparan Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua didasarkan atas undangan nomor UND-20/SETBPP/MKW/2025 yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2025 bertempat di Mansinam Beach Resort Hotel, Jl. Pasir Putih Manokwari, Papua Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Anggota Badan Pengarah Papua, Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura, Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Manokwari, dan Tim Sekretariat Wakil Presid



4. Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2025 bertempat di Gedung Keuangan Negara Manokwari. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar percepatan pembangunan di Tanah Papua dilakukan secara lebih konkret, terukur, dan berkeadilan. Presiden menekankan bahwa Papua harus menjadi prioritas pembangunan nasional dengan memastikan kesejahteraan masyarakat dan pelibatan aktif Orang Asli Papua (OAP) dalam setiap program pemerintah. Kegiatan ini dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Velix Vernando Wanggai serta para anggota Komite Eksekutif, para anggota BP3OKP dari enam provinsi di Tanah Papua, Kepala Sekretariat BP3OKP Papua Izharul Haq dan Kepala Sekretariat BP3OKP Papua Barat Moch. Abdul Kobir, serta unsur internal Sekretariat Wakil Presiden yaitu Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar dan Staf Khusus Wapres Achmad Aditya.
5. Pelaksanaan Internalisasi Aplikasi Presmo BPP
- Menindaklanjuti Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER2/SETBPP/JYP/2025 tentang Hak dan Kewajiban Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua, telah dilaksanakan internalisasi penggunaan aplikasi PRESMO BPP pada tanggal 23 Desember 2025 yang dihadiri oleh Anggota dan Pokja BPP Papua Barat.



BAB III DUKUNGAN SUBSTANTIF

A. RENCANA DAN PROGRAM KERJA BPP

Sesuai Surat Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor SI/SETBPP/JYP.02/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Format Rencana Kerja dan Program Kelompok Kerja BPP Tahun Anggaran 2025, seluruh anggota Badan Pengarah Papua wajib menyerahkan Rencana Program dan Kerja (Renproker) Tahun Anggaran 2025 kepada Kepala Sekretariat. Renproker tersebut harus memuat informasi yang meliputi misi/tema, uraian kegiatan, jenis kegiatan, peserta kegiatan, objek kegiatan, rencana pelaksanaan, tujuan pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan itu sendiri, dan output yang diharapkan.

No	Provinsi	Misi/Program	Uraian Rencana Kerja	Lokasi Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan
1	Papua Barat	Papua Cerdas	Peningkatan Kemampuan Berbahasa serta Sastra Generasi Muda Papua dan Integrasi Program Pendidikan Daerah	Kab. Sorong, Kab. Manokwari	Oktober 2025
2		Papua Sehat	Peningkatan Ketrampilan Usaha berbasis Komoditas Unggulan.	Kab. Manokwari	
3		Papua Produktif	Peningkatan Pemahaman pertanian dan tanah adat dan Kompetensi SDM OAP pada Manajemen Pemasaran	Kab. Manokwari Kab. Teluk Bintuni	
4		Papua Polhukam	Peningkatan Literasi terkait Hukum dan Peluang Investasi Ekonomi	Kab. Manokwari	
5		Papua Cerdas	Percepatan Penyerapan DOK dan Pendirian SMK Pariwisata	Kab. Kaimana	November 2025
6		Papua Sehat	Peningkatan Literasi Kesehatan	Kab. Manokwari	
7		Papua Produktif	Pengembangan Ekonomi Orang Asli Papua	Kab. Manokwari	
8		Papua Polhukam	Peningkatan Kewaspadaan terhadap Perikanan dan Kelautan	Kab. Kaimana	

Berdasarkan hasil pelaksanaan program kerja BPP Triwulan IV, terdapat beberapa masukan yang perlu menjadi perhatian untuk seluruh Anggota dan Pokja BPP terkait tugas dan fungsi BPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Kesenjangan Perencanaan:

Program kerja saat ini dinilai belum sepenuhnya menyelaraskan diri dengan prioritas pembangunan dalam RAPPP. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi mendalam secara mendetail dan berbasis spasial terhadap poin-poin prioritas yang terabaikan, serta analisis dampak dari ketidakselarasan tersebut. Sebagai ilustrasi, pada misi 'Papua Sehat', rencana yang hanya berfokus pada aspek administratif (anggaran dan pengawasan) harus dikoneksikan kembali dengan target RAPPP 2025-2029. Hal ini mencakup penjabaran indikator keberhasilan, penentuan lokus prioritas percepatan, serta pendefinisian objek monitoring yang lebih substansial.

2. Kurangnya Integrasi:

Rencana program kerja untuk sejumlah misi pembangunan terlihat masih bersifat parsial dan belum selaras dengan target makro RAPPP. Kurangnya konektivitas sistematis ini mencerminkan lemahnya internalisasi visi pembangunan Papua ke dalam dokumen perencanaan. Dibutuhkan sinkronisasi strategi agar setiap rencana kerja berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan jangka panjang.

B. KOMUNIKASI PUBLIK DAN PUBLIKASI BPP

Komunikasi publik merupakan tanggung jawab Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP) untuk menginformasikan kinerja, visi, dan misi kepada masyarakat. Lebih dari itu, komunikasi publik juga menjadi instrumen efektif untuk mengajak para pemangku kepentingan—pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat luas—berpartisipasi aktif dalam mengawal pembangunan di Papua. Sejalan dengan kesadaran tersebut, BPP telah meningkatkan intensitas kegiatan komunikasi publik Triwulan IV TA 2025 untuk menyampaikan pesan positif terkait percepatan pembangunan Papua. Upaya kolaboratif dengan berbagai pihak dilakukan secara berkelanjutan, termasuk sosialisasi peran dan fungsi BPP kepada seluruh lapisan masyarakat Papua. Penting untuk ditegaskan bahwa Anggota BPP bekerja secara kolektif melalui Kelompok Kerja (Pokja) BPP, yang turut berkontribusi optimal terhadap pembangunan Papua.

1. Focuss Group Discussion (FGD) Peningkatan Literasi dan Penyerapan Aspirasi Program JKN

a) Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 6 November 2025 secara luring bertempat di Aula Kasuari GKN Manokwari, Papua Barat.

b) Peserta Kegiatan

Kegiatan Workshop ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta pimpinan dan pejabat satuan kerja koordinator wilayah lingkup Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, meliputi unsur Forkopimda, BPK, Pengadilan, Kemenag, BPS, BPN, RRI, DJPb, BP3OKP serta BPJS Kesehatan dan instansi terkait lainnya.

c) Hasil yang dicapai

Melalui diskusi ini, diharapkan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap program JKN semakin meningkat, sejalan dengan visi Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif. Sinergi dan kolaborasi antar lembaga menjadi langkah nyata menuju layanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya.



2. Focus Group Discussion Pengembangan Ekonomi OAP

a) Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2025 secara luring bertempat di Aula Kasuari GKN Manokwari, Papua Barat.

b) Peserta Kegiatan

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah pusat dan daerah, lembaga vertikal, perbankan, organisasi usaha, tokoh adat, tokoh perempuan, akademisi, hingga komunitas masyarakat. Kehadiran berbagai pihak ini mempertegas pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan bagi OAP.

c) Hasil yang dicapai

FGD ini berlandaskan semangat implementasi Otonomi Khusus sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021. Melalui badan pengarah (BP3OKP/BPP), pemerintah berupaya memastikan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi kebijakan (SHEK) berjalan efektif mendukung misi besar pembangunan Papua: Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.



Tujuan FGD menekankan pengembangan sektor-sektor unggulan, industri pengolahan, pariwisata, perikanan, dan pertanian yang didukung potensi sumber daya alam Papua. Selain itu, forum ini mendorong peningkatan infrastruktur, penguatan UMKM, penyamaan komitmen antar pemangku kepentingan, serta penyelarasan kebijakan BP3OKP dan pemerintah daerah untuk memastikan Program Papua Produktif benar-benar berpihak pada OAP.



3. Koordinasi Fiskal Kabupaten Pegunungan Arfak

a) Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2025 secara luring bertempat di ruang rapat Sekda Kabupaten Pegunungan Arfak.

b) Peserta Kegiatan

Rapat ini dihadiri oleh Sekda beserta jajaran dan Plt. Kepala BPKAD.

c) Hasil yang dicapai

Pertemuan strategis ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat sinergi fiskal, khususnya dalam mengawal penyaluran Transfer ke Daerah (TKD). Fokus utama pembahasan diarahkan pada akselerasi penyampaian dokumen persyaratan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan penggunaan Dana Desa agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kampung, mengingat peran vital dana tersebut dalam menggerakkan ekonomi lokal di Pegunungan Arfak.

Selain membahas dana transfer, dalam koordinasi bersama Bapak Sekda, pertemuan ini juga menyoroti pentingnya kelancaran distribusi logistik melalui pengawalan ongkos angkut beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mengingat kondisi geografis Pegunungan Arfak yang memiliki tantangan medan cukup berat, kepastian anggaran dan ketepatan distribusi ongkos angkut ini menjadi sangat vital. Hal ini merupakan komitmen bersama antara Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Arfak untuk menjaga kesejahteraan pegawai serta stabilitas ketersediaan pangan bagi para pengabdian negeri di wilayah Pegunungan.

Menutup rangkaian agenda, Kabupaten Pegunungan Arfak menekankan komitmen penuh dalam persiapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 unaudited. Langkah proaktif ini diambil untuk memastikan proses rekonsiliasi data dan pelaporan berjalan akuntabel. Melalui pendampingan yang berkelanjutan kepada jajaran Pemkab Pegunungan Arfak, diharapkan kualitas

laporan keuangan daerah semakin meningkat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di seluruh Papua Barat.



C. PELAKSANAAN RAPAT KONSOLIDASI BPP BERSAMA ANGGOTA BPP DAN SEKRETARIAT BPP

1. Rapat Pleno BP3OKP bersama Wakil Presiden RI

a) Waktu dan Tempat

Rapat dilaksanakan di Aula Kasuari Gedung Keuangan Negara Manokwari, Kabupaten Manokwari Papua Barat pada tanggal 4 November 2025.

b) Peserta Kegiatan

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Wamendagri Ribka Haluk, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Velix Vernando Wanggai, serta para anggota Komite Eksekutif yaitu John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yanni, John Gluba Gebze, dan Juharson Estrella Sihasale. Selain itu, hadir pula para anggota BP3OKP dari enam provinsi di Tanah Papua, yaitu Albert Yoku (Papua), Irene Manibuy (Papua Barat), Yoseph Yanowo Yolmen (Papua Selatan), Pietrus Waine (Papua Tengah), Hantor Mayuan (Papua Pegunungan), dan Otto Ihalaw (Papua Barat Daya). Dari unsur sekretariat, hadir Kepala Sekretariat BP3OKP Papua Izharul Haq; dan Kepala Sekretariat BP3OKP Papua Barat Moch. Abdul Kobir. Sementara dari unsur internal Sekretariat Wakil Presiden hadir Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar dan Staf Khusus Wapres Achmad Aditya.

c) Hasil yang dicapai

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar percepatan pembangunan di Tanah Papua dilakukan secara lebih konkret, terukur, dan berkeadilan. Presiden menekankan bahwa Papua harus menjadi prioritas pembangunan nasional dengan memastikan kesejahteraan masyarakat dan pelibatan aktif Orang Asli Papua (OAP) dalam setiap program pemerintah.

Rapat dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tri Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Ribka menyampaikan bahwa rapat pleno ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan mandat Otonomi Khusus (Otsus) Papua sesuai arahan Presiden dan Wapres. Ia pun mengapresiasi kehadiran Gibran di Tanah



Papua dan menyebut kunjungan tersebut sebagai wujud nyata perhatian dan komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan di wilayah paling timur Indonesia itu. Dirinya juga menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam memastikan kebijakan Otsus Papua dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan pentingnya percepatan pembangunan di Tanah Papua yang harus dilakukan dengan kecepatan dan inovasi berlipat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. "Ini karena sekarang sudah ada dua lembaga, ini saya minta kecepatan, akselerasi pembangunan ini harus dua kali lipat. Inovasi dalam perumusan kebijakan harus dua kali lipat. Manfaat nyata yang diterima masyarakat harus dua kali lipat," tegas Wapres.



Wapres menambahkan, dua lembaga baru yakni BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua diharapkan mampu memperkuat sinergi kebijakan lintas sektor.

Rapat pleno ditutup dengan penyampaian rekomendasi dan usulan dari perwakilan enam provinsi di Tanah Papua. Masukan tersebut akan menjadi bahan dalam penetapan prioritas program percepatan pembangunan Otsus Papua ke depan.

2. Rapat Koordinasi Rekrutmen dan Evaluasi Pokja BP3OKP

a) Waktu dan Tempat

Rapat Koordinasi dilaksanakan pada 17 November 2025 di Jayapura.

b) Peserta Kegiatan

Rapat yang dihadiri oleh Sekretaris BP3OKP, seluruh Anggota BP3OKP seluruh Tanah Papua dan Sekretariat BP3OKP membahas mengenai penguatan peran Pokja BP3OKP

melalui Rekrutmen dan Evaluasi sebagai tindak lanjut arahan Bapak Wakil Presiden terkait akselerasi pembangunan Papua dengan kecepatan dan inovasi berlipat.

c) Hasil yang dicapai

- Peningkatan Inklusivitas OAP dan Akuntabilitas dalam Proses Rekrutmen.
- Optimalisasi Tata Kelola dan Perencanaan Rekrutmen serta Penyempurnaan Mekanisme Seleksi dan Pasca-Rekrutmen.
- Penguatan Ruang Lingkup Tugas Pokja sebagai wajah BP3OKP melalui deliverables wajib salah satunya Policy Brief kepada Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga.
- Penguatan Tata Kelola dengan SOP Teknis kerja Pokja BP3OKP untuk mengawal misi dalam RIPPP/RAPPP.

3. Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Kerja BPP dan Komite Eksekutif Tahun 2026

a) Waktu dan Tempat

Rapat Koordinasi dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 26-27 November 2025

b) Peserta Kegiatan

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota BPP, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otsus Papua,



serta perwakilan kementerian/lembaga terkait, antara lain Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Wakil Presiden, Direktorat Jenderal Anggaran, Setditjen Perbendaharaan, Dit. Sistem Perbendaharaan, Sekretariat BPP Manokwari dan Sekretariat BPP Jayapura..

c) Hasil yang Dicapai

Rapat ini difokuskan pada sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua, penyelarasan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), serta penguatan struktur dan tata kelola kelembagaan BPP dan Komite Eksekutif.

Dalam arahannya, pimpinan menegaskan pentingnya penguatan koordinasi pusat-daerah, optimalisasi peran Kelompok Kerja (Pokja), peningkatan tata kelola Dana Otonomi Khusus, serta perumusan rencana



kerja tahun 2026 yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada percepatan pembangunan Papua.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat harmonisasi kebijakan, memastikan efektivitas pelaksanaan program, dan mendorong percepatan pembangunan Papua secara berkelanjutan.

D. FASILITASI PELAKSANAAN KOORDINASI, KERJASAMA KELEMBAGAAN DAN PENGUMPULAN DATA PELAKSANAAN OTSUS

1. Rapat Koordinasi Teknis Akselerasi Penyerapan Anggaran 2025 serta pembahasan Rencana Anggaran Program (RAP) Papua Barat Tahun 2026

a) Waktu dan Tempat

Rapat dilaksanakan secara luring di Aula Kasuari GKN Manokwari Lt. 3 pada 19 November 2025.

b) Peserta Kegiatan

Peserta Kegiatan diikuti oleh OPD Provinsi Papua Barat.

c) Uraian Kegiatan

Sebagai Bendahara Umum Negara di daerah, Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat hadir menjalankan peran strategis dalam pengelolaan APBN dan menjaga ketersediaan kas negara. Kanwil DJPb juga berperan sebagai penyalur TKD di Tanah Papua melalui pengawalan, monitoring, dan percepatan penyaluran untuk mendukung efektivitas pembangunan daerah.

Penyaluran TKD yang optimal menjadi kunci agar program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan terukur, terencana, dan berkelanjutan. Akselerasi penyaluran bukan hanya memastikan kelancaran kegiatan, tetapi juga meningkatkan kualitas pembangunan, sehingga kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua dapat semakin terwujud.



2. Diskusi Kelompok Terpumpun Kebhinekaan: Sinergi Perlindungan Bahasa dan Sastra

a) Waktu dan Tempat

Rapat dilaksanakan secara luring di Jayapura pada tanggal 9-10 Oktober 2025.

b) Peserta Kegiatan

Peserta Kegiatan diikuti oleh Balai Bahasa Provinsi Papua Barat dan BPP RI se-Tanah Papua.

c) Hasil yang Dicapai

BPP RI Provinsi Papua Barat melalui POKJA Papua Cerdas diundang untuk mengikuti Diskusi Kelompok Terpumpun Kebhinekaan: Sinergi Perlindungan Bahasa dan Sastra. Tujuan utama diskusi yaitu penyelarasan Visi, Rencana Strategi, dan Langkah Konkret antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan BPP se Tanah Papua, untuk perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah Papua. Fungsi SHEK yang dilaksanakan POKJA Papua Cerdas, yaitu Koordinasi dan Sinergitas Visi dan Rencana Strategis BPP dengan Balai Bahasa Provinsi Papua.



3. Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Papua tahun 2025

a) Waktu dan Tempat

Rapat dilaksanakan secara luring di Sorong pada 20-22 Oktober 2025.

b) Peserta Kegiatan

Peserta Kegiatan diikuti oleh Balai Bahasa Provinsi Papua Barat, Kemendikdasmen RI, BPP se-Tanah Papua, .

c) Hasil yang Dicapai

Tujuannya untuk melestarikan Bahasa Daerah dan Revitalisasi Bahasa Daerah melalui Peningkatan Kemampuan Berbahasa serta Sastra Generasi Muda Papua. Hasil utama dari pertemuan tersebut yaitu Terdistribusi bahan ajar, yang mana program ini berhasil mengimplementasikan



pembelajaran bahasa daerah di sekolah dan komunitas, yang menjadi dasar bagi peserta festival. Kehadiran BPP/BP3OKP RI Perwakilan Papua Barat pada pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu melaksanakan fungsi SHEK (Fungsi Harmonisasi) untuk mengintegrasikan Program Strategis Papua Cerdas untuk mendorong akselerasi Bahasa Daerah sebagai Mata Pelajaran Muatan Lokal di Satuan Pendidikan secara berkelanjutan.

4. Koordinasi dan Komunikasi rencana Pembangunan Sekolah Rakyat

a) Waktu dan Tempat

Rapat dilaksanakan pada 23-28 November 2025 di Teluk Bintuni.

b) Peserta Kegiatan

Kegiatan dihadiri oleh Dinas Pendidikan, BPKAD, Bappedalitbang.

c) Hasil yang dicapai

Sampai dengan akhir November 2025, penyerapan belanja DOK telah mencapai 75%. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten tetap konsisten untuk menyiapkan syarat salur untuk memenuhi termin III tahun fiskal.



5. Pertemuan dengan Kepala Balai Besar KEMENSOS RI Region VI Jayapura

a) Waktu dan Tempat

Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat BP3OKP Papua Barat GKN Manokwari pada 31 Oktober 2025.

b) Peserta Kegiatan

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Pokja BP3OKP dan BPKAD Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari.

c) Hasil yang dicapai

Tujuannya, menyampaikan salah satu Program Strategis Nasional "Sekolah Rakyat", dibawah coordinator Kementerian Sosial. Hasilnya, sampai dengan saat ini, tidak semua kabupaten di Papua Barat memperoleh kesempatan untuk mengimplementasikan "Sekolah Rakyat", dikarenakan respon yang beragam dari tiap kabupaten, serta syarat yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh tiap Kabupaten di Papua Barat.



6. Audiensi bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN PAPUA BARAT)

a) Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat BP3OKP Papua Barat GKN Manokwari pada 2 Oktober 2025.

b) Peserta Kegiatan

Kegiatan dihadiri oleh seluruh anggota Pokja BP3OKP dan Kadin Papua Barat.

c) Hasil yang dicapai

- Terbangunnya kesepahaman untuk meningkatkan sinergi BP3OKP dan Kadin
- Komitmen keterlibatan Kadin dalam perencanaan Pembangunan daerah.



7. Audiensi Pengembangan Implementasi Program Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat

a) Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan di Aula Kasuari GKN Manokwari Lt. 3 pada tanggal 28 Oktober 2025.

b) Peserta Kegiatan

Kegiatan dihadiri oleh seluruh Pokja Papua Barat serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Papua Barat.

c) Hasil yang dicapai

Diskusi BP3OKP Papua Barat menekankan pentingnya pelestarian budaya lokal, termasuk bahasa daerah dan nilai-nilai tradisional, yang harus diintegrasikan ke dalam kurikulum lokal sekolah dan kegiatan komunitas. Program-program seperti Tunas Bahasa dan festival seni budaya diharapkan dapat membangkitkan semangat pelestarian budaya. Sebagai penutup, BP3OKP Papua Barat mengarahkan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dan media, untuk mengembangkan pariwisata Papua Barat secara berkelanjutan. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi wisata, meningkatkan promosi, serta memastikan adanya dukungan anggaran yang memadai. Adanya dana otonomi khusus dan kebijakan seperti Papua Produktif diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis masyarakat, dengan tujuan akhir meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat Papua.



8. Audiensi Pengembangan Implementasi Program Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat

a) Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2025 bertempat di Aula UNIPA Manokwari.

b) Peserta Kegiatan

Kegiatan dihadiri oleh Anggota Pokja, peserta seminar serta para akademisi.

c) Hasil yang dicapai

Peradaban kedua untuk membangun Pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP) harus dilakukan secara bersama-sama, berkoordinasi dengan organisasi atau Lembaga terkait termasuk lembaga pemerintah untuk mendukung program percepatan pembangunan Pendidikan di Tanah Papua. Hal tersebut didukung oleh Kepala Kementerian Agama Provinsi Papua



Barat Bapak Mayor, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragana (FKUB) Provinsi Papua Barat (Pdt. Simbyak) dan Pdt. Herman Dimara dan beberapa orang lainnya.

9. SHEK Bersama Disnaker Kabupaten Teluk Bintuni

a) Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2025 di kantor Dinas Tenaga Kerja Teluk Bintuni.

b) Peserta Kegiatan

Kegiatan dihadiri oleh Pokja Papua Produktif dan Dinas Tenaga Kerja Teluk Bintuni.

c) Hasil yang dicapai

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Teluk Bintuni memiliki program-program prioritas yang sangat berperan dalam peningkatan kompetensi anak-anak papua, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan ekonomi rakyat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah namun dengan keterbatasan dana yang bersumber hanya pada DBH migas tidak cukup dan untuk dana otsus Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Bintuni tidak mendapatkan. Perlu revisi Amdal Proyek LNG BP TANGGUH untuk meproteksi batas- batas wilayah karena Kota sorong masih mendapatkan keuntungan, yang seharusnya kota sorong sudah tidak masuk dalam wilayah provinsi papua Barat. Perlu regulasi undang-undang untuk memproteksi hak hak yang menjadi kewenangan Kabupaten Teluk Bintuni.



10. Kunjungan Kerja Kabupaten Pegunungan Arfak

a) Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2025 di Kantor Bappeda Pegunungan Arfak.

b) Peserta Kegiatan

Kegiatan dihadiri Anggota Pokja Papua Produktif, Bappeda Pegunungan Arfak, dan Dinas Pariwisata.

c) Hasil yang dicapai

Bappeda Kabupaten Pegaf dalam tugas perencanaannya telah melaksanakan KAK dan RAP hingga pada tahap ketiga Khusus untuk Dana tahap ketiga yang bersumber dari Otsus%, Otsus 1,25% sudah pencairan, sedangkan untuk DTI belum pencairan dikarenakan



dalam pelaporannya harus di sertakan pada data data fisik sehingga agak terlambat, selanjutnya DBH Migas Otsus (Menunggu Pencairan) untuk Kabupaten Pegaf sudah di ajukan tetapi itu kolektif karena merupakan kewenangan Provinsi sehingga harus menunggu kabupaten-kabupaten yang belum menyelesaikan KAK dan RAP sehingga secara bersamaan dapat di salurkan.



Sekertaris Dinas Pariwisata, menyapaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak melalui Dinas Pariwisata Tengah gencar melakukan promosi akan potensi pariwisata di wilayah yang akrab di sebut Pegunungan Arfak (Pegaf). Tak tanggung- tanggung, Pegaf didapuk sebagai pariwisata pegunungan bersanding dengan Raja Ampat sebagai pariwisata bahari yang bakal jadi andalan kabupaten. Adapun beberapa objek wisata yang bisa ditemukan di Pegunungan Arfak berdasarkan tinjauan, seperti Danau Perempuan (Anggi Gida) dan Danau laki-laki (Anggi Giji), Air terjun, Gua Laomot yang diklaim terpanjang setelah perancis dengan 2.800 meter vertical dan horizontal, rumah tradisional suku arfak yang di sebut rumah kaki seribu, bunga andemik anggrek, hingga pulau mengapung yang bisa bergerak sendiri yang kini belum bertuan.

11. Rapat Koordinasi Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Kesehatan

a) Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26-28 November 2025 di Banten.

b) Peserta Kegiatan

Kegiatan dihadiri oleh Anggota Pokja Papua Sehat, serta Kementerian Kesehatan.

c) Hasil yang dicapai

Rapat koordinasi khusus membahas penugasan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk wilayah Papua tahun 2025, sebagai upaya meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan di daerah 3T. BP3OKP Papua Barat menekankan bahwa dalam mendatangkan tenaga dokter, harus



tersedia sarana penunjang berupa alat kesehatan dan obat-obatan yang memadai agar tenaga dokter dapat bekerja secara efektif. Dokter dan tenaga kesehatan wajib bekerja secara maksimal dalam program penugasan khusus yang dibiayai melalui APBN. Kementerian Kesehatan segera mengirimkan surat kepada Gubernur dengan tembusan ke BP3OKP untuk melakukan sosialisasi mengenai program penugasan khusus tenaga kesehatan dan dokter yang pendanaannya bersumber dari APBN. Rumah sakit diwajibkan

untuk melakukan pemetaan (mapping) jumlah tenaga dokter, yang mencakup dokter umum dan dokter spesialis yang tersedia.

12. SHEK Bersama Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kaimana

a) Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kaimana pada tanggal 26 November 2025.

b) Peserta Kegiatan

Kegiatan dihadiri oleh Anggota Pokja Papua Cerdas, dan Papua Damai serta Dinas Perikanan dan Kelautan.

c) Hasil yang dicapai

Koordinasi BP3OKP melalui Pokja Papua cerdas dan Pokja Papua Polhukam bersama Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kaimana, Ibu Herlin Ubey. Dalam koordinasi tersebut membahas permasalahan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaimana, terutama menyangkut Budidaya Perikanan Darat dan Perikanan Laut tetapi juga Budidaya Rumput Laut yang akhir-akhir ini menjadi minat kerja para nelayan karena harga dipasar semakin meningkat. Namun dalam tataran pelaksanaannya terdapat tumpang tindih regulasi baik Peraturan Pemerintah (PP), Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) serta belum tersedia dan berfungsinya Peran Provinsi dan Kabupaten yang mengatur tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Potensi Kelautan dan Perikanan. Permasalahan inti yang menonjol adalah bahwa kebijakan kelautan diatur oleh Perda Provinsi Papua Barat sedangkan Perikanan diatur dalam Perda Kabupaten Kaimana. Secara logika hukum bahwa Kelautan dan Perikanan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara laut dan ikan.

Dalam konteks tersebut maka diharapkan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan agar Pemda Provinsi Papua Barat dapat membuat kebijakan untuk memproteksi hak-hak masyarakat adat di Laut dengan regulasi atau Produk hukum Daerah dalam hal ini Perdasi tentang pemanfaatan Sumber Daya Laut dan Ikan Bagi Orang Asli Papua (OAP), agar Perdasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Kabupaten Kaimana dalam pemanfaatan Sumber Daya Laut dan Perikanan di daerah untuk kesejahteraan masyarakat terutama Orang Asli Papua (OAP). Khusus tentang Undang-Undang Perikanan yang merupakan Undang-Undang sektoral (Lex Specialis) disarankan masyarakat nelayan agar dicabut karena masyarakat nelayan khususnya masyarakat adat menghendaki adanya perdasi yang menjabarkan substansi Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan.



13. Pendampingan BPP Papua Barat dalam Audiensi Pemerintah Daerah Kabupaten

Pegunungan Arfak

a) Waktu dan Tempat

Audiensi dilaksanakan di Ruang Rapat BPP Lantai 3 GKN Manokwari pada tanggal 24 Desember 2025.

b) Peserta Kegiatan

Kegiatan dihadiri oleh Anggota BPP Papua Barat dan Ketua Tim Substantif Sekretariat BPP Manokwari, serta perwakilan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Nelson Sayuri (Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda).

c) Hasil yang dicapai

Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak terus berkomitmen untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah melalui koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat terkait mekanisme Transfer ke Daerah (TKD). Konsultasi ini menjadi langkah strategis bagi kabupaten yang terletak di dataran tinggi Papua Barat ini untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan fiskal nasional. Dalam pertemuan tersebut, fokus utama diarahkan pada sinkronisasi TKD guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat menyentuh sektor-sektor krusial seperti infrastruktur jalan, akses kesehatan, dan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat di pelosok Pegunungan Arfak.

Selain membahas sisi administratif, konsultasi ini juga menjadi ruang bagi Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk menyampaikan aspirasi mengenai tantangan geografis yang unik dalam pelaksanaan anggaran di lapangan. Dengan adanya pemahaman yang sama antara pusat dan daerah, diharapkan penyaluran dana transfer dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui sinergi ini, Pegunungan Arfak optimis dapat mempercepat transformasi wilayahnya, mempersempit kesenjangan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di tengah tantangan medan yang berat.



BAB IV PENDING MATTERS

Beberapa *pending matters* pada triwulan IV tahun 2025 berupa isu permasalahan dan rekomendasi yang berhasil diidentifikasi terkait pelaksanaan tugas Sekretariat BPP di Manokwari adalah sebagai berikut:

No	Isu Permasalahan	Rekomendasi
Administratif		
1	Penyediaan Hunian bagi BPP	Sehubungan dengan beberapa Rumah Dinas Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat yang rusak dan masih dikuasai oleh pihak ketiga, maka anggota Pokja BPP Papua Barat belum mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman dengan Infrastruktur dan sarana prasarana yang diharapkan. Prasarana Mess Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat yang tersedia saat ini hanya memadai untuk Pejabat Eselon IV dan Pelaksana Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat. Dalam hal Pengadaan Mess untuk BPP Papua Barat. Pembangunan Mess pembangunan akan dilanjutkan kembali pada Tahun Anggaran 2026.
2	Kelengkapan Keanggotaan Pokja BPP	Telah dilaksanakan rekrutmen Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua Tahun 2025 melalui PENG-2/SETBPP/JYP/2025 dari latar belakang sebagai Akademisi, Profesional, dan/atau representasi Orang Asli Papua.
3	Belum tersedianya Tata Naskah Dinas BPP	Tata naskah dinas memiliki beberapa fungsi penting dalam menghadapi pengelolaan administrasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan atau institusi. Sedangkan BPP Provinsi Papua Barat belum memiliki standar Tata Naskah Dinas. Dengan adanya tata naskah dinas yang baik dan seragam, diharapkan pengelolaan dokumen dapat berjalan dengan lancar dan efektif, serta mendukung kelancaran operasional dan komunikasi di BPP Provinsi Papua Barat.
4	Rancangan Manajemen Kinerja BPP	Perlu disusun pengaturan mengenai Manajemen Kinerja, Peta strategis, Sasaran Strategis dan IKU Kelompok Kerja (Pokja) BPP.
Substantif		
1	Integrasi pelaksanaan program prioritas yang mengacu pada RAPPP 2025-2029	✓ Melakukan kajian mendalam terhadap RAPPP 2025-2029 yang telah ditetapkan (Perpres 107

No	Isu Permasalahan	Rekomendasi
	pada 3 visi Papua (Sehat, Cerdas dan Produktif) dan disertai dukungan untuk Papua Damai	tahun 2025); ✓ Menyusun langkah-langkah strategis dalam pengintegrasian pelaksanaan program prioritas yang dilaksanakan dan dibiayai oleh DIPA K/L maupun melalui APBD Pemda (PAD, TKD)
2	Optimalisasi Fungsi "S-H-E-K" yang Masih Normatif, Fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) seringkali terjebak pada level administratif (rapat koordinasi) namun belum menyentuh substansi penyelesaian hambatan di lapangan.	Standardisasi Instrumen Evaluasi Dampak, misal dengan mengembangkan instrumen evaluasi yang mengukur manfaat nyata bagi OAP.

BAB V PENUTUP

Laporan Dukungan Substantif Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua Barat Triwulan IV Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat selaku Sekretariat BPP di Manokwari terkait pelaksanaan fungsi fasilitasi baik secara administratif maupun secara substantif dalam pelaksanaan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi Badan Pengarah Papua.

Laporan ini juga merupakan rangkuman atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan baik yang berupa rapat kerja dan konsolidasi, komunikasi publik, maupun koordinasi, kerjasama kelembagaan dan pengumpulan data pelaksanaan otsus yang telah dilaksanakan oleh para anggota BPP melalui dukungan Sekretariat BPP dari sisi substantif.

Tidak kalah pentingnya, laporan ini menjadi wujud komitmen dan peran aktif Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam mendukung keberhasilan implementasi tata kelola Otsus yang baru. Upaya tersebut dilakukan demi menunjang keberhasilan implementasi tata kelola Otsus, sekaligus dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama Orang Asli Papua.



SEKRETARIAT BADAN PENGARAH PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT